KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN MINGGUAN

17 OKTOBER- 23 OKTOBER 2026



085 - 169 - 767 - 212
@pemasyarakatanjogja

SAMBUTAN KAKANWIL



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dapat menyusun laporan kegiatan ini. Publikasi ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan, sekaligus menjadi sarana informasi mengenai berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Seluruh kegiatan yang tersaji dalam laporan ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam memperkuat pembinaan warga binaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Kanwil Ditjenpas DIY secara menyeluruh, menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin maju, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

M. ALI SYEH BANNA

KAKANWIL DITJENPAS DIY PERKUAT TUGAS, APRESIASI KINERJA PEGAWAI

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) DIY menggelar apel pagi rutin di lingkungan kantor, Senin (19/10). Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DIY Muhammad Ali Syeh Banna memberikan penguatan kepada seluruh jajaran sekaligus mengapresiasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.



Dalam amanatnya, Muhammad Ali Syeh Banna menekankan pentingnya setiap pegawai memahami dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, pelaksanaan tugas harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari upaya memberikan kinerja terbaik bagi organisasi.

Kakanwil juga mengingatkan jajaran untuk terus menjaga semangat dalam bekerja serta membangun koordinasi dan kerja sama yang baik. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kekompakan dan sinergi seluruh jajaran dalam menjalankan amanah organisasi.

“Setiap tugas yang kita emban merupakan amanah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari terus tingkatkan kualitas kinerja, jaga kedisiplinan, dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas,” ujar Muhammad Ali Syeh Banna.

Apel pagi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas DIY dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, seluruh pegawai diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penguatan yang disampaikan dalam apel pagi, Kanwil Ditjenpas DIY berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan tugas, memperkuat integritas, serta membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.





TINGKATKAN KEIMANAN & KETAQWAAN, DITJENPAS DIY SELAMI SURAH AL-AN'AM





YOGYAKARTA – Upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperkuat integritas pegawai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) DIY melaksanakan kegiatan pembinaan rohani melalui kajian ayat-ayat suci Al-Qur'an di Musala Al Ishlah Kanwil Ditjenpas DIY, Senin (19/10).

Kegiatan tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY, Muhammad Ali Syeh Banna. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dalam pelaksanaan tugas sekaligus membangun karakter pegawai yang beriman, bertakwa, dan berintegritas.

Dalam kajian kali ini, para pegawai bersama-sama mendalami kandungan Surah Al-An'am ayat 1–42. Melalui pembacaan dan pemaknaan ayat-ayat tersebut, para pegawai diajak untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan, serta menjadikan ajaran Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Muhammad Ali Syeh Banna mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT dan menumbuhkan rasa syukur dalam setiap keadaan. Ia menekankan bahwa Surah Al-An'am ayat 1 mengingatkan manusia bahwa segala puji hanya milik Allah SWT, yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan gelap dan terang.

"Sesulit atau segelap apa pun kondisi hidup saat ini, ingatlah bahwa Allah yang menciptakan 'terang' setelah 'gelap'. Selalu ada harapan bagi mereka yang bersyukur," ujar Ali.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pegawai bahwa setiap tantangan dalam kehidupan maupun pekerjaan perlu dihadapi dengan kesabaran, keyakinan, dan sikap optimistis. Dengan memperkuat hubungan spiritual kepada Allah SWT, diharapkan setiap pegawai mampu menjaga ketenangan hati, berpikir jernih, serta mengambil keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

PERKUAT PEMBINAAN PEGAWAI, KANWIL DITJENPAS DIY TEKEN PKS DENGAN UST

YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembinaan pegawai yang lebih terarah melalui kolaborasi dengan dunia akademik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Ditjenpas DIY dan Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Senin (19/10). Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, bersama Dekan Fakultas Psikologi UST, Titik Muti'ah, Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara institusi pemasyarakatan dan perguruan tinggi, khususnya dalam mendukung pengembangan pendekatan pembinaan pegawai yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan pengembangan Proyek Perubahan REKSA, yaitu penyusunan Pedoman Pembinaan bagi Pegawai yang Terkena Hukuman Disiplin. Melalui REKSA, pembinaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan disiplin, tetapi juga memberikan ruang bagi perbaikan perilaku, penguatan integritas, serta peningkatan profesionalisme pegawai.





Keterlibatan Fakultas Psikologi UST diharapkan dapat memperkuat pendekatan pembinaan melalui perspektif psikologi, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pegawai. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pembinaan yang tidak hanya menekankan akuntabilitas, tetapi juga mendorong perubahan positif dan keberlanjutan perbaikan diri.

Melalui kerja sama ini, Kanwil Ditjenpas DIY berharap kolaborasi dengan dunia akademik dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia pemasyarakatan. Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kanwil Ditjenpas DIY untuk membangun aparatur yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta fungsi pemasyarakatan.



REVOLUSI HUKUMAN: KANWIL DITJENPAS DIY & UII BAHAS PIDANA TANPA PENJARA





YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta menerima audiensi Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Senin (19/10). Audiensi yang berlangsung di Kanwil Ditjenpas DIY tersebut membahas rencana penelitian terkait penguatan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam implementasi kebijakan pidana non-pemenjaraan dan community-based corrections.

Audiensi ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian bertajuk "Model Penguatan Fungsi Balai Pemasyarakatan dalam Implementasi Kebijakan Pidana Non-Pemenjaraan dan Community-Based Corrections" yang dilaksanakan di PUSHAM UII Yogyakarta dengan dukungan The Asia Foundation Jakarta. Pertemuan antara Kanwil Ditjenpas DIY dan PUSHAM UII menjadi ruang strategis untuk membangun kesepahaman mengenai penerapan pidana non-pemenjaraan serta community-based corrections.

Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang berfokus pada pencegahan, pemulihan keseimbangan, penyelesaian konflik, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peran kunci melalui penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dengan melibatkannya lingkungan masyarakat.

Melalui pembahasan rencana penelitian terkait dokumentasi pembelajaran, model pelibatan masyarakat, dan alternatif pemidanaan, audiensi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta kolaborasi kedua pihak dalam mendukung pengembangan kebijakan dan praktik Pemasyarakatan secara berkelanjutan.

KOLABORASI DENGAN BPVP BANTUL, KANWIL DITJENPAS DIY PERLUAS PELUANG KETERAMPILAN WARGA BINAAN

BANTUL – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pembinaan dan keterampilan warga binaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penjajakan kerja sama dengan Satuan Pelaksana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bantul pada Selasa (20/10).

Dalam audiensi tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas DIY, Kristiana Hambawani, disambut hangat oleh Raden Rohadijanto selaku Koordinator Satpel PVP Bantul. Pertemuan ini menjadi momentum untuk menjajaki peluang kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi bagi warga binaan, sebagai upaya memperkuat pembinaan kemandirian dan meningkatkan kompetensi yang bermanfaat setelah mereka kembali ke masyarakat.





Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas akses warga binaan terhadap program pelatihan keterampilan yang aplikatif dan berorientasi pada dunia kerja maupun wirausaha. Melalui dukungan BPVP Bantul, warga binaan diharapkan memperoleh bekal kompetensi, pengalaman praktik, serta keterampilan produktif yang dapat dikembangkan sebagai modal untuk kembali berdaya di tengah masyarakat.

Kristiana Hambawani menegaskan bahwa peningkatan keterampilan merupakan bagian penting dari proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Pembinaan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Melalui kolaborasi ini, pemasyarakatan terus mendorong warga binaan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemandirian, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik sebagai bagian dari reintegrasi sosial.

OMBUDSMAN RI PANTAU LAPAS JOGJA, DITJENPAS DIY TEGASKAN KOMITMEN TRANSPARANSI

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) mendampingi Ombudsman Republik Indonesia dalam kegiatan monitoring dan pengawasan layanan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Selasa (20/10).



Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI dalam mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan Pemasyarakatan, sekaligus menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada 29 September 2026. Monitoring difokuskan pada lima aspek yang menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, tim Ombudsman melakukan pemantauan secara langsung terhadap penyelenggaraan layanan di Lapas Yogyakarta. Pengawasan juga dilakukan melalui wawancara dengan pengunjung atau keluarga warga binaan, warga binaan, serta pegawai pengampu layanan publik guna memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan.

Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menyambut positif pelaksanaan monitoring dan pengawasan eksternal sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas serta tata kelola pelayanan publik yang transparan, profesional, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan serta hasil evaluasi dijadikan bahan perbaikan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak warga binaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY juga terus memperkuat sinergi dengan Ombudsman RI serta mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah DIY agar menghadirkan layanan yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

PERKUAT PEMBINAAN KEAGAMAAN WARGA BINAAN, KANWIL DITJENPAS DIY DAN KEMENAG DIY RESMI JALIN KERJA SAMA

YOGYAKARTA – Perkuat sinergi dalam pembinaan kepribadian warga binaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenag DIY) menandatangani Perjanjian Kerja Sama di bidang keagamaan dan pemasyarakatan, Selasa (20/10).





Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenag DIY tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, bersama Kepala Kanwil Kemenag DIY, H. Ahmad Bahiej. Penandatanganan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat komitmen kedua instansi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi warga binaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenag DIY, H. Ahmad Bahiej, menyampaikan bahwa proses pembinaan warga binaan membutuhkan kerja sama dan sinergi antarlembaga. **"Melalui kolaborasi ini, masing-masing pihak diharapkan dapat memaksimalkan peran dan kontribusinya sehingga pembinaan keagamaan dapat berjalan lebih optimal,"** tutur Ahmad Bahiej.

Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kemenag DIY atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin selama ini, khususnya dalam mendukung proses pembinaan warga binaan.

Sinergi antara Kanwil Ditjenpas DIY dan Kanwil Kemenag DIY diharapkan mampu menghadirkan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan, memperkuat kualitas kepribadian warga binaan, serta menumbuhkan kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Melalui kerja sama ini, Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong terwujudnya pemasyarakatan yang humanis, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

PERKUAT AKURASI DATA WBP, DITJENPAS DIY MATANGKAN ASESMEN CALON PESERTA REHABILITASI



Yogyakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Penguatan dan Penjelasan Pelaksanaan Asesmen Calon Peserta Program Rehabilitasi dan Reedukasi secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Selasa (20/10). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Ditjenpas DIY ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan tim terkait.

Acara dibuka dengan sambutan dan pengarahan langsung dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam arahannya, disampaikan evaluasi capaian target peserta program rehabilitasi dan reedukasi secara nasional yang saat ini tercatat sebanyak 31.214 orang dan masih terus dipacu pemenuhannya.

Selama jalannya rapat, dibahas berbagai masukan krusial mengenai konsistensi aturan dalam klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan diusulkan dalam proses asesmen. Seluruh jajaran ditekankan untuk senantiasa mengedepankan kevalidan data selama proses pengusulan dan pelaksanaan asesmen berlangsung. Setelah sesi pembahasan dan tanya jawab selesai, rapat dilanjutkan dengan koordinasi tingkat wilayah bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui fasilitas breakout room.

Tim Asesmen diharapkan memperhatikan berbagai aspek menyeluruh yang dapat memengaruhi hasil rekomendasi asesmen, mencakup aspek administratif, pembinaan, penilaian perilaku WBP, hingga tingkat risiko. Selain itu, pertimbangan terhadap aspek keamanan dan ketertiban juga menjadi poin kunci sebelum rekomendasi resmi diberikan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Kanwil Ditjenpas DIY dalam mendorong program Rehabilitasi dan Reedukasi Pemasyarakatan guna mengurai permasalahan overkapasitas sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh UPT Pemasyarakatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



EVALUASI KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN: TIM ANALIS KEBIJAKAN KANWIL DITJENPAS DIY JARING ASPIRASI DI LPKA YOGYAKARTA DAN BAPAS WONOSARI

Yogyakarta – Tim Analis Kebijakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengumpulan data analisis kebijakan di LPKA Class II Yogyakarta dan Bapas Kelas II Wonosari pada Selasa (20/10).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, M. Haidar Fikri, kegiatan yang melibatkan sampel pegawai dari berbagai seksi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini menggunakan metode pengisian kuesioner dan diskusi dua arah guna menjaring aspirasi serta memetakan berbagai kendala regulasi maupun operasional di lapangan.

Dalam forum diskusi tersebut, terungkap sejumlah isu strategis terkait kebutuhan perbaikan payung hukum teknis. Poin-poin mendesak yang mengemuka di antaranya adalah belum tersedianya Peraturan/Keputusan Menteri mengenai pembimbingan klien dewasa, ketidakpastian mekanisme dan jangka waktu sanksi bagi klien yang melanggar ketentuan, konsekuensi hukum bagi penjamin, serta ketidakjelasan penjabaran KUHAP terkait pelibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pidana kerja sosial.

Selain itu, para peserta juga memaparkan kendala tata kelola seperti prosedur registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dengan penjamin di luar wilayah operasional, pelaksanaan putusan pengadilan terkait latihan kerja bagi anak binaan yang belum terfasilitasi secara optimal di LPKA, hingga tuntutan program ketahanan pangan di LPKA yang terbatas pada program kerja formal.

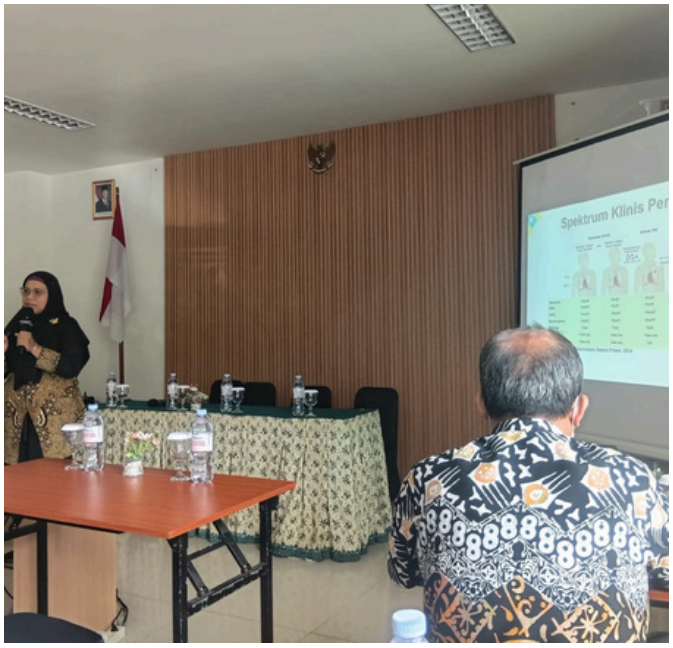




Berdasarkan hasil pengolahan data awal, ditemukan dinamika di mana indikator relevansi substansi kebijakan memperoleh nilai tertinggi, sementara indikator implementasi kebijakan justru mencatatkan nilai terendah akibat masih ditemukannya celah aturan serta hambatan operasional.

Seluruh inventarisasi masalah dan jaring aspirasi ini akan diolah lebih lanjut oleh Tim Analis Kebijakan Kanwil Ditjenpas DIY sebagai bahan penyusunan rekomendasi analisis kebijakan kepada pimpinan, guna memperkuat pelaksanaan regulasi, menyempurnakan pedoman kerja, serta mendorong evaluasi kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif di masa mendatang.

KANWIL DITJENPAS DIY DUKUNG PROGRAM ELIMINASI TBC LEWAT SINERGI BERSAMA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan perkantoran yang sehat, aman, dan produktif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran instansi dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Tuberkulosis (TBC) di Tempat Kerja Non-Fasyankes yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta di Edotel Kenari, Umbulharjo, Selasa (20/10).

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY ini diawali dengan sambutan dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dalam arahannya, disampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen serta kapasitas pemangku kepentingan instansi di wilayah DIY dalam menerapkan prinsip PPI TBC, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dari penularan serta bebas dari stigma negatif terhadap penyintas.

Pelaksanaan program ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022. Melalui pemaparan narasumber, ditekankan pula bahwa penerapan PPI TBC di sektor non-fasilitas pelayanan kesehatan masih menemui tantangan nyata, terutama terkait kebutuhan standarisasi regulasi ventilasi dan tata udara di ruang kerja yang harus terus dibenahi.

Forum sosialisasi tersebut turut membedah enam pilar strategi nasional eliminasi TBC. Strategi komprehensif tersebut mencakup penguatan komitmen kepemimpinan pusat dan daerah, peningkatan akses layanan bermutu berpihak pada pasien, optimalisasi promosi pencegahan, pemanfaatan skrining dan tatalaksana cepat, peningkatan peran aktif komunitas, serta penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh.

Sebagai wujud tindak lanjut konkret di lingkungan kerja, Kanwil Ditjenpas DIY siap mengimplementasikan sejumlah langkah strategis mencakup pembangunan jejaring koordinasi dengan puskesmas domisili untuk skrining berkala, pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), penguatan PPI TBC di tempat kerja, serta pembentukan budaya kerja yang saling mendukung dan peduli terhadap rekan sejawat.

PERKUAT SINERGITAS DAN KETERTIBAN, KANWIL DITJENPAS DIY KOORDINASIKAN IZIN PENELITIAN MAHASISWA DAN RENCANA IN-HOUSE TRAINING DI LAPAS SLEMAN



SLEMAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) dalam upaya memastikan seluruh kegiatan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) berjalan sesuai standar keamanan dan tata kelola yang baik, Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, menyampaikan laporan koordinasi terkait perizinan penelitian dan pengambilan gambar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman.

Kegiatan koordinasi yang berlangsung pada Selasa (20/10) dilaksanakan oleh Tim Pamintel Pas, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), serta Pembimbing Kemasyarakatan Pengaduan (PKP) bersama jajaran pejabat struktural Lapas Sleman.

Fokus utama dari pertemuan ini adalah membahas persiapan teknis penelitian dan pengambilan gambar yang akan dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Arsitektur Universitas Islam Indonesia (UII). Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga ketertiban lingkungan pemasyarakatan selama proses penelitian berlangsung, disepakati bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan mendapatkan pendampingan ketat dari jajaran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) serta seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm Kamtib). Diskusi ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Sleman, KPLP, Kasi Adm Kamtib, serta perwakilan jajaran Tata Usaha.

Selain mematangkan rencana pendampingan penelitian akademis, forum koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan rencana penyelenggaraan in-house training bagi petugas pemasyarakatan. Program pelatihan internal ini dirancang dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Ditjenpas DIY guna memberikan penguatan materi di Bidang Pelayanan dan Pembinaan (PP).

Seluruh rangkaian kegiatan koordinasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sekaligus menjadi wujud komitmen Kanwil Ditjenpas DIY dalam mendukung kegiatan riset pendidikan tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan penguatan kapasitas SDM di UPT.

DUKUNG PROSES REINTEGRASI,
KAKANWIL DITJENPAS DIY BERI PELATIHAN KLIEN

YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ali Syeh Banna, memimpin langsung kegiatan Pelatihan dan Terapi Pijat Energi bagi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta pada Rabu (21/10). Kegiatan pembimbingan ini bertempat di Griya Abhipraya Purbonegoro DIY.





Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran serta arahan langsung dari Kakanwil Ditjenpas DIY. Ia berharap para peserta memiliki kemauan yang kuat serta konsistensi dalam mengikuti pelatihan ini agar materi yang didapatkan dapat memberikan hasil yang optimal.

Sementara itu, Ali Syeh Banna menekankan pentingnya menuntut dan mengamalkan ilmu. Menurutnya, seseorang yang berilmu dan mampu memanfaatkannya untuk kebaikan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT serta membawa keberkahan bagi lingkungan sekitar.

“Jika kita mampu mengamalkan ilmu yang didapat, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Salah satu manfaat utama dari terapi pijat energi adalah untuk menjaga kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa," ungkap Ali Syeh.

Dalam pelaksanaannya, sesi terapi dan pelatihan diawali dengan niat serta doa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Para peserta kemudian diajarkan beberapa teknik pernapasan dan olah energi, di antaranya napas syukur, napas pembersih, dan napas kesadaran yang disertai hitungan pernapasan (21 kali sebanyak 3 sesi) dan zikir untuk menghadirkan ketenangan jiwa, merujuk pada keutamaan zikir dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta dapat memperoleh bekal keterampilan baru, memelihara kesehatan fisik dan mental, serta siap kembali berintegrasi di tengah masyarakat dengan membawa energi positif dan semangat baru

OMBUDSMAN RI SOROTI LIMA ASPEK LAYANAN RUTAN YOGYAKARTA





YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) mendampingi Ombudsman Republik Indonesia dalam kegiatan monitoring dan pengawasan layanan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta, Rabu (21/10).

Kedatangan tim Ombudsman RI bersama jajaran Kanwil Ditjenpas DIY disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIA Yogyakarta beserta jajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan pelayanan publik sekaligus mendorong perbaikan tata kelola Pemasyarakatan agar semakin transparan, profesional, dan akuntabel.

Monitoring tersebut difokuskan pada lima aspek yang menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pemasyarakatan. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI pada 29 September 2026.

Dalam pelaksanaannya, tim Ombudsman melakukan peninjauan langsung terhadap penyelenggaraan layanan di Rutan Yogyakarta. Pengawasan turut dilakukan melalui wawancara dengan pengunjung atau keluarga warga binaan, warga binaan, serta pegawai pengampu layanan publik guna memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan.

Melalui wawancara tersebut, tim Ombudsman menggali informasi terkait kemudahan akses, transparansi prosedur, hingga berbagai kendala yang dihadapi penerima layanan. Sementara itu, petugas turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan serta penerapan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, M. Ali Syeh Banna, menegaskan bahwa pihaknya menyambut positif pelaksanaan pengawasan eksternal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh satuan kerja Pemasyarakatan wilayah DIY.

Melalui kegiatan monitoring ini, Kanwil Ditjenpas DIY berharap hasil evaluasi Ombudsman RI dapat memperkuat sinergi interlembaga dalam membenahi pelayanan publik secara berkelanjutan. Langkah ini berfokus pada mewujudkan tata kelola yang responsif, berintegritas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pemenuhan hak warga binaan.

KAKANWIL DITJENPAS DIY DORONG JAJARAN TERBUKA DENGAN PEMANTAUAN OMBUDSMAN



YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kakanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan survei dan pemantauan pelayanan publik oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman, Rabu (21/10).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta warga binaan.
Ali Syeh Banna mendukung keterlibatan Ombudsman dalam memantau pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi jajaran untuk memperoleh masukan objektif sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.

Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY melakukan kegiatan pemantauan dan survei pelayanan di Lapas Kelas IIB Sleman yang disambut oleh Kalapas Tri Mulyono beserta jajaran. Rangkaian kegiatan meliputi peninjauan fasilitas klinik dan blok hunian, serta pelaksanaan survei langsung kepada keluarga warga binaan terkait layanan kunjungan dan kepada warga binaan mengenai pengalaman masa pembinaan.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY meminta seluruh jajaran untuk terbuka terhadap evaluasi eksternal dan menjadikan masukan Ombudsman sebagai momentum berbenah.

Hasil pemantauan ini diharapkan menjadi dasar evaluasi konkret bagi Lapas Sleman untuk memperkuat akuntabilitas, memastikan pemenuhan hak warga binaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara adil, profesional, dan berintegritas.



KAKANWIL DITJENPAS DIY DUKUNG PENUH INOVASI REKSA UNTUK PEMBINAAN PEGAWAI



Yogyakarta - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ali Syeh Banna, memberikan dukungan penuh terhadap hadirnya inovasi program pembinaan bertajuk REKSA.

Dukungan tersebut disampaikan secara langsung dalam kegiatan pembinaan bagi pegawai yang sedang menjalani Hukuman Disiplin (Hukdis) di Aula Semar Wicaksana Kanwil Ditjenpas DIY, Kamis (22/10).

Inovasi REKSA ini digagas sebagai langkah solutif atas beberapa kejadian yang terjadi, salah satunya usulan mutasi pegawai yang terkena hukuman disiplin, sehingga alih-alih sekadar memindahkan pegawai bermasala, program ini hadir untuk memberikan wadah pembinaan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Dalam arahannya, Ali menekankan pentingnya niat serta kesadaran dari dalam diri masing-masing pegawai untuk mengevaluasi diri dan berbenah. Beliau menyambut baik inovasi ini dan menegaskan bahwa pihak pimpinan siap memberikan penguatan serta kesempatan bagi jajaran yang berkomitmen untuk membenahi integritasnya.

"Kembali lagi ke pribadi masing-masing, kembalilah ke jalan yang benar, Kami mendukung penuh pegawai yang ingin berubah. Belajarlah dari kaca mobil. Kaca depan begitu luas, sedangkan kaca spion begitu kecil. Sebab, apa yang ada di depan jauh lebih penting daripada apa yang telah kita tinggalkan. Namun, sesekali menolehlah ke belakang agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama." tegas Ali.



Melalui komitmen dan dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah ini, hadirnya inovasi REKSA diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM, mengurangi risiko pengulangan pelanggaran indisipliner, serta mengembalikan integritas pegawai. Pada akhirnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya nyata Kanwil Ditjenpas DIY dalam menguatkan kembali pelayanan kepada masyarakat.

PERLUAS AKSES KEADILAN BAGI WARGA BINAAN, KANWIL DITJENPAS DIY GANDENG OBH



YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) menggelar Rapat Koordinasi bersama sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayah DIY. Kegiatan yang berlangsung di Klampox, Kamis (22/10), ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi guna memperluas akses keadilan bagi tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Rapat koordinasi tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY, Ina Purnaningati Saputro, mewakili Kepala Kanwil Ditjenpas DIY. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan penyamaan persepsi antara jajaran Pemasyarakatan dengan organisasi bantuan hukum dalam mengoptimalkan penyelenggaraan layanan bantuan hukum di lingkungan Lapas dan Rutan.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan Kanwil Ditjenpas DIY bersama organisasi bantuan hukum menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bagi tahanan dan Warga Binaan.

Dalam sambutannya, Ina menekankan bahwa kolaborasi berkesinambungan ini sangat penting untuk menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan layanan hukum.

Acara ini juga diisi dengan pemaparan materi oleh Bayu Putro Panerus mengenai mekanisme dan koordinasi layanan bantuan hukum, dilanjutkan dengan sesi diskusi antarpeserta untuk meningkatkan kualitas layanan.

Melalui forum ini, Kanwil Ditjenpas DIY berharap sinergi yang terjalin dapat mewujudkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang inklusif, transparan, serta berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia di wilayah DIY.

KAKANWIL DITJENPAS DIY BEKALI KLIEN BAPAS WONOSARI KETERAMPILAN PIJAT

BANTUL – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, M. Ali Syeh Banna, memimpin langsung kegiatan pelatihan dan terapi pijat energi bagi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang tergabung dalam Griya Abhipraya Pandawa, Kamis (22/10). Kegiatan pembimbingan tersebut berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bantul.





Kegiatan ini menjadi bagian dari pembimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan melalui pembekalan keterampilan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta tidak hanya mendapatkan terapi pijat energi, tetapi juga mengikuti pelatihan teknik pijat serta olah pernapasan dan energi.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Syeh Banna menekankan pentingnya kemauan untuk belajar dan mengamalkan ilmu yang diperoleh. Menurutnya, keterampilan yang diberikan dalam kegiatan pembimbingan diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

Ali juga mengajak para klien untuk senantiasa mensyukuri kehidupan dan membangun kebiasaan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberikan manfaat melalui kemampuan yang dimiliki.

Kegiatan ini menjadi ruang interaksi humanis antara Kakanwil dan para klien pemasyarakatan untuk memberikan motivasi serta membangun kepercayaan diri mereka dalam menjalani proses pembimbingan dan persiapan reintegrasi sosial. Melalui pendekatan ini, Kanwil Ditjenpas DIY terus mendorong pelaksanaan pemasyarakatan yang humanis agar bekal keterampilan, penguatan mental, dan nilai-nilai positif yang diperoleh dapat menjadikan para klien pribadi yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

KANWIL DITJENPAS DIY DORONG PENINGKATAN EFEKTIVITAS TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN LEWAT MONEV DI BAPAS WONOSARI





WONOSARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus berkomitmen mengoptimalkan mutu pelayanan publik dan tertib administrasi di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Kamis (22/10).

Agenda monev tersebut dipimpin langsung oleh jajaran perwakilan Kanwil Ditjenpas DIY bersama Kepala Urusan Umum serta para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Wonosari. Kegiatan ini difokuskan untuk memantau langsung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis, khususnya penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), koordinasi pelimpahan berkas antar-Bapas, keseragaman administrasi pelibatan masyarakat, hingga pelaksanaan Litmas perawatan tahanan dan pembinaan awal.

Kanwil Ditjenpas DIY merumuskan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi tantangan operasional Bapas, seperti potensi keterlambatan tindak lanjut berkas Litmas antar-Bapas pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) serta ketidakseragaman format administrasi pelibatan masyarakat di wilayah kerja DIY. Solusi yang diterapkan mencakup penguatan komunikasi intensif antar-Bapas pengirim dan peneriba guna memastikan ketepatan waktu penyelesaian administrasi, serta penyediaan tautan pedoman format administrasi terbaru untuk diimplementasikan oleh Bapas Kelas II Wonosari.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi ini menegaskan pentingnya orientasi kerja yang presisi di mana Litmas perawatan tahanan berfokus pada kondisi klien dan Litmas pembinaan awal berfokus pada penggalian minat bakat guna mendongkrak kualitas pelayanan publik serta profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan secara berkelanjutan.

KANWIL DITJENPAS DIY TANGANI LAPORAN ADUAN SECARA KOMPREHENSIF BERSAMA JAJARAN BAPAS WONOSARI



WONOSARI - Kanwil Ditjenpas DIY terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan penegakan prinsip profesionalisme di lingkungan kerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan investigasi dan tindak lanjut aduan secara langsung di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Kamis (22/10).

Kegiatan penanganan dan peninjauan langsung ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas DIY bersama Tim Investigasi Lanjutan Aduan. Agenda tersebut turut melibatkan unsur petugas Bapas Wonosari serta pihak klien pemasyarakatan guna menggali keterangan yang objektif, berimbang, dan menyeluruh.

Dalam proses penelusuran di lapangan, tim investigasi meminta keterangan secara mendalam dari sejumlah pihak terkait, meliputi Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Bapas Wonosari, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pertama, hingga pihak klien yang bersangkutan. Langkah klarifikasi ini diambil guna memastikan setiap permasalahan yang dilaporkan dapat dipahami secara utuh berdasarkan fakta-fakta yang valid.

Sebagai tindak lanjut dari sesi investigasi tersebut, disepakati sejumlah langkah administratif yang terstruktur. Bapas Wonosari akan segera menyusun dan mengirimkan surat klarifikasi resmi kepada Kanwil Ditjenpas DIY, yang diperkuat dengan surat pernyataan dari pihak klien sebagai data dukung pendukung. Selanjutnya, Kanwil Ditjenpas DIY akan menerbitkan surat balasan resmi sebagai bentuk penyelesaian akhir atas aduan tersebut.

Seluruh rangkaian kegiatan investigasi dan koordinasi ini berlangsung dengan lancar, tertib, serta kondusif. Langkah proaktif yang ditempuh Kanwil Ditjenpas DIY ini mencerminkan keseriusan instansi dalam merespons setiap dinamika operasional, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah DIY berjalan semakin akuntabel dan berintegritas.

STAFSUS MENTERI APRESIASI PRESTASI LAPAS YOGYAKARTA DI BIDANG SPIRITUAL



YOGYAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Hubungan Kemasyarakatan, Ahmad Fanani, memberikan apresiasi atas prestasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta dalam pembinaan mental dan spiritual warga binaan. Apresiasi tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan lapangan dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY), Muhammad Ali Syeh Banna, Jumat (23/10/2026).

Salah satu capaian yang mendapat perhatian Ahmad Fanani adalah penghargaan "Spiritual and Mental Health Support in Chaplaincy" dari Rahmah Chaplaincy Indonesia yang diraih oleh Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi dalam mendukung pembinaan spiritual dan kesehatan mental di lingkungan Pemasyarakatan.

Ahmad Fanani menilai capaian tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan spiritual warga binaan. Menurutnya, pembinaan yang menyentuh aspek kemanusiaan merupakan bagian penting dalam membantu warga binaan menjalani proses perubahan perilaku.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Muhammad Ali Syeh Banna, menyampaikan bahwa apresiasi dari Staf Khusus Menteri menjadi motivasi bagi jajaran Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan.

Melalui kunjungan ini, Kanwil Ditjenpas DIY berharap penguatan pembinaan berbasis pendekatan kemanusiaan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.



RANGKUMAN KEGIATAN SIDANG TPP MINGGU INI PADA KANWIL DITJENPAS DIY

23 WBP DAN ANAK BINAAN DIUSULKAN INTEGRASI



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mengintensifkan pemenuhan hak integrasi serta layanan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Anak Binaan. Langkah strategis untuk mendukung program pembinaan dan mereduksi overkapasitas UPT ini diwujudkan melalui Rangkaian Sidang Tim Pertimbangan/Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang diselenggarakan secara bergantian di empat UPT sepekan ini, yakni Rutan Kelas IIA Yogyakarta pada Selasa (20/10), Rutan Kelas IIB Wates dan Rutan Kelas IIB Bantul pada Kamis (22/10), serta LPKA Kelas II Yogyakarta pada Jumat (23/10).

Rangkaian sidang TPP sepekan ini melibatkan sinergi lintas jajaran pemasyarakatan dan instansi terkait di wilayah DIY. Pelaksanaannya dihadiri oleh Ketua Sidang dan Anggota TPP masing-masing UPT, pejabat struktural, Wali Pemasyarakatan, perwakilan Kantor Wilayah Ditjenpas DIY (termasuk PK Madya), serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Yogyakarta.

Fokus agenda Sidang TPP pekan ini mencakup pembahasan kelayakan pengusulan Hak Integrasi, seperti Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB), penempatan kerja, pelayanan medis, hingga program pembinaan khusus. Dari hasil pembahasan di seluruh UPT, total 23 usulan hak integrasi berhasil disetujui, yang terdiri dari 5 WBP Rutan Yogyakarta (5 CB), 6 WBP Rutan Wates (integrasi & penempatan kerja), 9 WBP Rutan Bantul (8 CB & 1 PB), serta 3 Anak Binaan LPKA Yogyakarta (CB & PB). Selain usulan integrasi, TPP Rutan Bantul menyetujui rekomendasi pelayanan medis bagi 2 WBP (operasi cabut gigi dan isolasi penyakit menular), sementara LPKA Yogyakarta menyetujui 4 Anak Binaan untuk mengikuti Program Omah Konseling.

Proses penelaahan dan penetapan kelayakan usulan WBP dilaksanakan secara mendalam dan ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Pertimbangan Pemasyarakatan secara cermat mengevaluasi seluruh aspek administratif, indikator substantif, penilaian perilaku harian, hasil asesmen risiko, serta rekam jejak pembinaan guna memastikan kelayakan setiap warga binaan sebelum memberikan rekomendasi resmi.

Melalui gelaran Sidang TPP sepanjang pekan ini, Kanwil Ditjenpas DIY memproyeksikan pengusulan hak integrasi dan program pembinaan sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mengurai tingkat hunian berlebih di UPT. Rangkaian kegiatan ini secara resmi dilaporkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan (Ina Purnaningati Saputro) kepada Kepala Kanwil Ditjenpas DIY sebagai bahan evaluasi berkala dan dasar perumusan kebijakan teknis pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta.



KANWIL DITJENPAS DIY IKUTI RAPAT MANAJEMEN TALENTA KEMENIMIPAS GUNA WUJUDKAN SISTEM MERIT DAN PROFESIONALISME ASN

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjenpas DIY) terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional melalui penerapan sistem merit. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti kegiatan Rapat Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diselenggarakan secara hybrid dari Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Ditjenpas DIY serta tempat tugas masing-masing pegawai pada Jumat (23/10).



Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa penyelenggaraan manajemen talenta merupakan langkah krusial untuk memastikan proses pemetaan, pengembangan karier, dan suksesi kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) berjalan secara transparan, akuntabel, serta berbasis pada kualifikasi dan kompetensi.

Penilaian talenta pegawai dilakukan melalui mekanisme 9-box matrix yang memetakan kinerja pada sumbu Y (bobot 60% kinerja utama dan 40% kinerja penguat) serta potensial pada sumbu X yang mencakup kompetensi, pengembangan diri, pengalaman jabatan, hingga integritas dan moralitas.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, seluruh pegawai diwajibkan segera melakukan peremajaan data secara mandiri dan cermat pada sistem kepegawaian meliputi riwayat jabatan serta sertifikasi/diklat struktural termasuk Latsar CPNS—sekaligus melakukan pengecekan berkala pada dokumen verifikasi di aplikasi Document Management System (DMS) melalui koordinasi dengan Tim SDM Kanwil Ditjenpas DIY.

Melalui akselerasi pembentukan talent pool dan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan serta pengelola kepegawaian, Kanwil Ditjenpas DIY optimis penataan karier dan promosi jabatan berbasis keadilan serta transparansi di lingkungan kementerian dapat terwujud secara optimal.

KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Yogyakarta, 23 Oktober 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY,

Muhammad Ali Syeh Banna



MUHAMMAD ALI SYEH BANNA
KAKANWIL DITJENPAS DIY